

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Banyaknya jumlah penduduk dan pulau yang tersebar menjadikan Indonesia memilih sebagai negara yang menganut otonomi daerah yang pelaksanaan pemerintahannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya atas kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (halim,2007:1). Diberlakukannya otonomi daerah ini merupakan pergantian sistem pemerintahan yaitu dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi.

Dengan sistem otonomi daerah tersebut akan memberikan kewenangan untuk mengelola sendiri daerahnya maka terjadi persaingan antar daerah yang ada di Indonesia dalam mengelola potensi ekonomi yang ada di daerahnya dengan menemukan cara-cara baru yang kreatif dan tentunya mengurangi beban pemerintah pusat. Jika strategi ini berhasil maka Indonesia akan lebih cepat pencapaian untuk mensejahterakan bangsa Indonesia, dan masyarakat di daerah yang semakin sejahtera akan menyadari bahwa kondisi yang mereka nikmati merupakan kebijakan otonomi daerah yang digunakan oleh pemerintah pusat.

Konsekuensi diberlakukannya otonomi daerah yaitu adanya peningkatan akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah agar tujuan desentralisasi kekuasaan dicapai. Tetapi yang terjadi masih rendahnya tingkat kemandirian suatu daerah karena masih mengandalkan pemerintah pusat melalui dana perimbangan yang diberikan untuk kebutuhan daerahnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan/pemasukan yang berasal dari daerah itu sendiri. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Maka kemampuan suatu daerah untuk mendapatkan PAD akan mempengaruhi terhadap

perkembangan, dan pembangunan daerahnya. Jika PAD semakin besar maka dikatakan bahwa sebuah daerah mampu untuk melaksanakan desentralisasi fiskal dan berkurangnya ketergantungan terhadap pemerintah pusat. PAD merupakan salah satu yang mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah.

Selain pendapatan asli daerah, dana perimbangan juga termasuk dalam sumber penerimaan daerah yang mempunyai kontribusi besar terhadap struktur APBD. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) sebagai salah satu wujud dari komitmen antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. Adanya dana perimbangan bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam mendanai kewenangannya, mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara pusat dengan daerah, dan mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah.

Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan atas keadilan dan kepatuhan (Bastian, 2012).

Ukuran pemerintah daerah dapat dilihat dari total aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menunjukkan seberapa besar pemerintah daerah, agar dapat memberikan pelayanan yang optimal untuk masyarakat harus didukung dengan aset yang memadai dan memudahkan untuk melakukan kegiatan operasional sehingga akan memberika kelancaran untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Daerah yang memiliki ukuran daerah atau total aset yang lebih besar akan memiliki tuntutan yang besar dalam melaporkan pengungkapan kepada publik. Pemerintah daerah perlu mengungkapkan lebih lanjut tentang daftar aset yang dimiliki, pemeliharaan, dan pengelolaannya (Suhardjanto *et al.*2010)

Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah sangat penting untuk dilakukan karena pemerintah pusat menerapkan kebijakan otonomi daerah dengan harapan bahwa pemerintah daerah dapat lebih mandiri dalam mengelola keuangan daerahnya dengan tujuan agar proses pembangunan yang dilakukan daerah dapat

diselesaikan dengan cepat tanpa harus menunggu bantuan pendanaan yang bersumber dari pusat (Antasar dan Sedana,2018)

Kinerja keuangan adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai kekuasaan dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan rakyat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Florida:2007) dalam alfarisi.205. Kinerja dapat diketahui jika individu atau kelompok itu mempunyai kriteria keberhasilan yang sudah ditetapkan (Mokodompit et al., 2014). Salah satu kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur rumah tangganya adalah kemampuan daerah dalam bidang keuangan daerah.

Analisis kinerja keuangan bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pemerintah, mengukur potensi mendapatkan atau sumber ekonomi, mengetahui kondisi keuangan, mengetahui kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya, dan menyakini bahwa pemerintah telah melaksanakan anggaran sesuai dengan keuangan (mahmudi.2010:142).

Pengukuran kinerja keuangan dapat dijadikan evaluasi untuk kepentingan publik dan memaksimalkan kinerja dengan membandingkan skema kerja dan pelaksanaannya. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat memberikan kontribusi terhadap kenaikan pendapatan daerah setiap tahunnya dengan melihat seberapa besar kemampuan pemerintah daerah untuk menggali potensi-potensi daerahnya (antasari dan Sedana ,2018). Kinerja keuangan pemerintah mengalami peningkatan maka akan berdampak untuk kesejahteraan masyarakat, ketika semakin tinggi mendapatkan pendapatan dari hasil potensi-potensi di daerahnya maka hasil itu akan digunakan untuk membiayai pembangunan daerah, menjalankan sistem pemerintahan dan digunakan secara maksimal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola keuangan akan terlihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang melihat kemampuan pemerintah daerah untuk menggunakan dana tersebut dalam kegiatan

pelaksanaan tugas pembagunan, pemerataan kesejahteraan dan keadilan dengan mengembangkan semua potensi yang dimiliki oleh daerahnya. APBD yang dimiliki dari pendapatan akan digunakan untuk pendanaan kebutuhan daerahnya, dan berharap setiap tahunnya pendapatan tersebut akan terus meningkat secara signifikan. APBD akan disusun sesuai dengan pemerintah dan kemampuan keuangan daerahnya.

Cara pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu dengan membandingkan besarnya anggaran yang ada dalam APBD dengan nilai realisasi APBD. Tinggi atau rendahnya hasil perhitungan itu akan menjadikan acuan baik atau buruknya kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun kenyataan masih banyaknya pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja keuangan yang belum optimal. Persentase anggaran dana perimbangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih sangat bergantung terhadap pemerintah pusat. Tingkat ketergantungan yang tinggi dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat membuktikan bahwa daerah itu kebutuhan belanja daerah dan pembiayaan pengeluaran lebih banyak di danai oleh dana perimbangan yang di dapat dari pemerintah pusat.

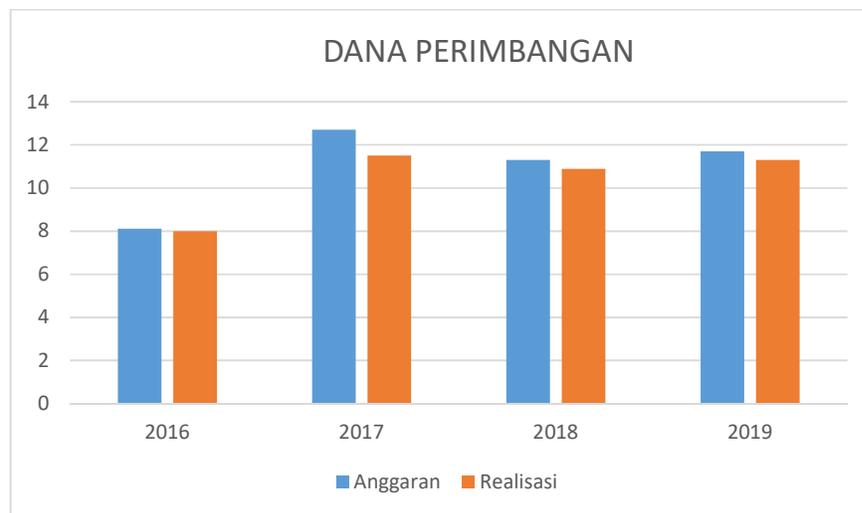
Tabel 1.1 Menyajikan Data Mengenai Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah Pada Tahun 2016-2019



Tabel 1.1 menyajikan data anggaran dan realisasi pendapatan asli daerah jawa tengah pada tahun 2016-2019. Anggaran pada 2017 pada jawa tengah mengalami penurunan tetapi provinsi jawa tengah pada tahun 2018, dan 2019 terus menaikkan

anggaran pendapatan asli daerahnya dan provinsi jawa tengah selalu naik realisasi pendapatan asli daerahnya dari tahun 2016 sampai 2019 ini menandakan bahwa kinerja provinsi jawa tengah berkerja keras untuk mendapatkan tambahan pendapatan asli daerahnya dan menggali potensi yang ada di daerahnya. Pada tahun 2017 dan 2018 provinsi jawa tengah berhasil mendapatkan realisasi pendapatan asli daerah yang lebih tinggi dari anggaran yang sudah direncanakan sebelumnya.

Tabel 1.2 Menyajikan Data Mengenai Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan Provinsi Jawa Tengah Pada Tahun 2016-2019



Tabel 1.2 menyajikan data anggaran dan realisasi dana perimbangan provinsi jawa tengah pada tahun 2016-2019. Pada anggaran dana perimbangan pada tahun 2017 mengalami kenaikan tetapi pada tahun 2018-2019 mengalami fluktuatif dan realisasi dana perimbangan dari tahun 2016-2019 pemerintah provinsi jawa tengah hampir mencapai realisasi anggaran yang ditentukan tetapi secara realisasi yang di dapat provinsi jawa tengah mengalami fluktuatif (naik dan turun).

Penelitian terhadap variabel pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya menemui hasil penelitian yang berbeda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Chrisna Dwi Heryanti (2019) dan Indah Puspa Sari (2018) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian yang berbeda dibuktikan oleh Ni Kadek Novia Indrwati Putri dan Ni Putu Ayu

Darmayanti (2019) yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian berbeda juga terjadi pada variabel Dana Perimbangan yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ihsan Wahyudi dan Hastuti (2020), dan Indah Puspa Sari (2018) menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Tetapi berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Budianto dan Stanly W Alexander (2016) yang menunjukkan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dari penelitian di atas ditemukan perbedaan hasil penelitian terkait dengan variabel yang diteliti oleh penulis yaitu pendapatan asli daerah dan dana perimbangan menjadi salah satu permasalahan. Dengan adanya perbedaan kedua hasil penelitian di atas maka peneliti ingin meneliti ulang variabel yang sama untuk mencari pengaruh atau tidaknya variabel tersebut. Peneliti juga menambahkan variabel baru dalam penelitian ini yaitu ukuran pemerintah daerah untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan peneliti memilih provinsi Jawa Tengah karena menunjukkan kinerja keuangan pemerintah yang baik dengan ditunjukkannya pada tabel 1.1 dan tabel 1.2 karena provinsi Jawa Tengah telah berhasil mendapatkan pendapatan asli daerahnya lebih besar dari pada dana perimbangan yang diterima.

Berdasarkan pernyataan sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2019”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka dapat diambil beberapa permasalahan yang akan dibahas, ialah sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi jawa tengah.
2. Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi jawa tengah.
3. Apakah ukuran pemerintah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi jawa tengah.
4. Apakah pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan ukuran pemerintah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi jawa tengah.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian di atas, yaitu:

1. Mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi jawa tengah.
2. Mengetahui pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi jawa tengah.
3. Mengetahui pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi jawa tengah.
4. Mengetahui pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi jawa tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan yang berguna bagi berbagai pihak yang berkepentingan yaitu:

1. Bagi pemerintah,
Penelitian ini diharapkan menjadi evaluasi hasil kinerja dari pemerintah berdasarkan analisis hasil penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat

dijadikan acuan untuk satuan kinerja perangkat daerah di provinsi jawa tengah untuk meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat.

2. Bagi pihak investor dan masyarakat

Penelitian ini diharapkan sebagai acuan hasil kinerja pemerintah provinsi jawa tengah dalam mengoptimalkan potensi-potensi yang ada dan menjadi informasi untuk masyarakat yang ingin mengetahui pendapatan asli daerah, dana perimbangan, ukuran pemerintah provinsi jawa tengah

3. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan menjadi sarana untuk menambah wawasan dan mendapatkan pengetahuan peneliti berdasarkan hasil dari mencermati kejadian-kejadian yang telah terjadi

4. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau acuan untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti mengenai pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan ukuran pemerintah.